

Meninjau Peran Gerakan Perempuan Mosintuwu Pasca Konflik Poso dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Melalui Pendekatan *Gender-Responsive Peacebuilding*

Tiffany Setyo Pratiwi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: tiffanysubarman@gmail.com

ABSTRACT

The role of women in the peace building process is very crucial both at the conflict prevention stage, during the conflict, and after the conflict. This article focuses on analyzing the role and empowerment of women in overcoming post-conflict especially the issue of gender-based violence in Poso. The women's movement is Mosintuwu Institute. The author will use a gender-responsive peacebuilding approach with guidelines prepared by the United Nations Development Program (UNDP) to analyze it. The author uses qualitative research methods by collecting data from various secondary sources, like journal articles, news and related official websites. From the case study analysis of the Mosintuwu women's movement in Poso based on the concept of gender-responsive peacebuilding, it was found that: First, this movement has a main agenda of protecting and assisting gender-based violence (GBV) victims. Second, this movement massively and innovatively uses various media for education and aspirations related to the GBV issue in Poso. Third, women in Poso who come from various backgrounds have a central role in this movement, especially building peace in stopping the GBV in Poso.

Keywords: Mosintuwu Women's Movement, Post-Poso Conflict, Peacebuilding, and Gender-Responsive Peacebuilding

ABSTRAK

Peran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan perdamaian berkelanjutan adalah hal yang sangat krusial baik pada tahap pencegahan konflik, saat terjadinya konflik, hingga pasca konflik. Tulisan ini memfokuskan untuk menganalisis peran dan pemberdayaan perempuan dalam mengatasi kekerasan berbasis gender pasca konflik dengan mengangkat sebuah gerakan di Poso, yakni gerakan Mosintuwu. Penulis akan menggunakan pendekatan *gender-responsive peacebuilding* dengan panduan yang disusun oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk menganalisisnya. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber sekunder yakni artikel jurnal, berita, dan website-website resmi terkait. Dari analisis studi kasus gerakan perempuan Mosintuwu di Poso berdasarkan konsep *gender-responsive peacebuilding* ditemukan bahwa: Pertama, gerakan ini memiliki agenda utama dalam perlindungan dan pendampingan korban KBG. Kedua, gerakan ini secara masif dan inovatif menggunakan berbagai media untuk jalur edukasi dan aspirasi terkait isu KBG di Poso. Ketiga, Perempuan-perempuan di Poso yang berasal dari berbagai latar belakang memiliki peran yang sentral dalam pergerakan ini, khususnya membangun perdamaian dalam menghentikan KBG di Poso.

Kata Kunci: Gerakan Perempuan Mosintuwu, Pasca Konflik Poso, Pembangunan Perdamaian, dan Gender-Responsive Peacebuilding

PENDAHULUAN

Dalam proses membangun perdamaian berbagai pendekatan dan peranan aktor sangat diperlukan untuk saling bersinergi. Elemen dalam masyarakat memiliki potensi yang besar untuk bisa dilibatkan dalam proses pembangunan perdamaian baik pada pencegahan konflik, saat terjadi konflik, hingga pasca konflik. Partisipasi perempuan dalam membangun perdamaian merupakan peranan yang perlu dilibatkan. Perempuan diyakini memiliki sisi psiko-sosial yang mampu membantu mempercepat proses perdamaian hingga pembangunan perdamaian pasca konflik. Tulisan ini akan menganalisis peranan perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan perdamaian pasca konflik Poso. Studi kasus yang di angkat ialah peran gerakan perempuan Mosintuwu di Poso dalam mencegah dan merespon kekerasan berbasis gender (KBG) pasca konflik. Penulis akan menggunakan konsep *gender-responsive peacebuilding* dengan dibantu panduan yang disusun oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk menganalisisnya.

KBG dan pemberdayaan perempuan mempunyai keterkaitan hubungan yang kompleks dalam konteks krisis dan konflik. Upaya untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan politik perempuan dalam proses pemulihan dapat memberikan mereka perlindungan, sumber daya, dan kapasitas yang dibutuhkan untuk melawan KBG. Selanjutnya untuk mencegah dan merespon KBG, maka langkah-langkah seperti penyediaan layanan yang setara, kampanye untuk menantang kekerasan maskulinitas dan mengubah sikap serta perilaku stereotip, memungkinkan untuk menciptakan kondisi pemberdayaan yang lebih besar bagi perempuan dan anak perempuan (UNDP: 2019). Kita perlu menganalisis peran perempuan dalam proses pembangunan perdamaian dikarenakan masih saja terbangun konstruksi sosial, tanggapan, atau penilaian dari masyarakat, ataupun individu terhadap peran perempuan yang dianggap hanya sebagai pelengkap dalam proses pembangunan perdamaian. Selain itu, kebijakan-kebijakan untuk pemberdayaan perempuan masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Kompleksitas hambatan dan tantangan ini berasal dari diskriminasi gender sebagai akar munculnya berbagai bentuk ketidaksetaraan gender seperti dalam aspek pendidikan dan pekerjaan hingga terjadinya kekerasan berbasis gender (Oswald: 2023). Padahal seiring berkembangnya zaman, peran perempuan dalam berbagai kegiatan semakin diakui. Dalam perkembangannya dukungan negara-negara dan organisasi internasional untuk melibatkan secara aktif peran perempuan dalam proses pembangunan perdamaian sudah dilakukan. Dukungan dalam agenda-agenda internasional terhadap peran perempuan dalam pembangunan perdamaian yang saat ini diupayakan adalah melalui Agenda 2030 dan khususnya *Sustainable*

Tiffany Setyo Pratiwi

Meninjau Peran Gerakan Perempuan Mosintuwu Pasca Konflik Poso dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Melalui Pendekatan *Gender-Responsive Peacebuilding*

Development Goals (SDGs) poin ke-16 yang mengakui pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam membangun keadilan perdamaian yang inklusif di masyarakat. Oleh karenanya, kemajuan menuju SDGs tidak akan tercapai jika perempuan tidak diberi akses terhadap pengambilan keputusan dan keagenan perempuan dalam pembangunan perdamaian (www.undp.org). Di Afrika, pelibatan perempuan juga diberikan penghargaan oleh Uni Afrika sebagai upaya memberikan dukungan bagi perempuan Afrika yang berdedikasi dalam proses perdamaian (au.int). Partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian di lapangan memang terjadi, namun sayangnya peran mereka seringkali lebih banyak berada pada tingkat informal dan jarang terlibat pada tingkat formal dalam pembuatan keputusan (UN Women 2015c).

Di Indonesia pelibatan perempuan dalam proses pembangunan perdamaian telah diimplementasi lewat sebuah kebijakan bernama RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial), yang mana membawa Indonesia sebagai negara yang menyumbang *women peacekeepers* atau agen penjaga perdamaian perempuan terbesar ke-7 di dunia dan pertama di Asia Tenggara (kemenpppa.go.id). Di laman berita *United Nations News* menerbitkan sebuah artikel yang berjudul “*Explainer: Why women’s role in sustaining peace is more critical than ever*” (news.un.org). Dimana artikel berita tersebut menegaskan kembali mengapa peran perempuan dalam menjaga perdamaian menjadi lebih penting dari sebelumnya dengan menyoroti tiga hal penting, yaitu: keterlibatan aktif perempuan dalam mempercepat negosiasi, kemampuan perempuan sebagai ahli dalam memperjuangkan hak perempuan di wilayah konflik, dan peran aktif perempuan dalam membangun kepercayaan masyarakat lokal. Gambaran ini menunjukkan masih perlunya upaya membangun kesadaran masyarakat dan dunia mengenai peran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan perdamaian adalah hal yang sangat krusial dan bukan sekedar pelengkap. Tulisan ini hadir untuk menguatkan gagasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini mengambil studi kasus yang ada di Indonesia, tepatnya di Poso. Studi kasus terkait kekerasan berbasis gender pasca konflik Poso merupakan fokus utama penelitian ini. Penulis melakukan pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang berasal dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, berita online, website resmi terkait topik yang diangkat, dan referensi online lainnya yang kredibel. Penelitian ini akan menganalisis peranan perempuan

dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan perdamaian pasca konflik Poso. Studi kasus yang di angkat ialah peran gerakan perempuan Mosintuwu di Poso dalam mencegah dan merespon kekerasan berbasis gender (KBG) pasca konflik. Penulis akan menggunakan konsep *gender-responsive peacebuilding* dengan dibantu panduan yang disusun oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk menganalisisnya.

KERANGKA KONSEPTUAL

a. Pendekatan *Gender-Responsive Peacebuilding*

Gender-Responsive Peacebuilding atau Pembangunan Perdamaian yang Responsif Gender dimaknai sebagai hadirnya partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, artinya pendekatan pembangunan perdamaian yang sensitif gender menyoroti perlunya pemberdayaan perempuan untuk mempertahankan perdamaian di tingkat lokal sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun kapasitas politik, kelembagaan, dan lokal yang kuat (Aggestam dan Holmgren: 2022). Artinya memastikan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian bukan hanya persoalan hak-hak perempuan dan anak perempuan. Perempuan adalah mitra penting dalam menopang tiga pilar perdamaian abadi: pemulihan ekonomi, kohesi sosial dan legitimasi politik (securitycouncilreport). Pendekatan gender dalam pembangunan perdamaian mengakui peran perempuan dan laki-laki sebagai kunci menuju keberhasilan perdamaian dan keberlanjutan upaya pembangunan perdamaian serta perubahan norma-norma sosial yang berpotensi menjadi halangan (undp.org). Dalam mengkonsepkan pembangunan perdamaian yang responsif gender, *United Nations Development Programme/UNDP* telah menyusun panduan, yang mana panduan ini salah satunya membahas tentang mencegah dan merespon KBG. Penulis memaparkan panduan tersebut dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1. Pembangunan Perdamaian yang Responsif Gender Untuk Kekerasan Berbasis Gender (UNDP: 2019)

Panduan	Peran yang dilakukan
---------	----------------------

Mencegah dan Merespon Kekerasan Berbasis Gender Pasca Konflik	<ol style="list-style-type: none"> a. Memberdayakan perempuan untuk menjadi anggota dalam struktur kepemimpinan terhadap pencegahan kekerasan berbasis gender pada situasi pasca krisis, dan bisa mempromosikan perubahan perilaku sejalan dengan Hak Asasi Manusia internasional. b. Memfasilitasi masukan dan peran kepemimpinan oleh perempuan di semua sektor, untuk memastikan fasilitas-fasilitas yang memberikan keamanan bagi perempuan dan anak perempuan serta anggota masyarakat yang paling rentan. c. Dukungan melalui pelatihan, asosiasi jurnalis perempuan, dan membuat video dokumenter oleh media mengenai isu-isu kekerasan berbasis gender yang dapat membuka jalan menuju toleransi. d. Memberikan akses penyembuhan trauma bagi para penyintas.
---	---

2. Konsep Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender (KBG) bisa terjadi di situasi apapun termasuk saat situasi konflik atau pasca konflik. Kekerasan berbasis gender (KBG) sering diidentikkan dengan kekerasan terhadap perempuan, akan tetapi juga mencakup perbuatan pelanggaran antar personal, organisasi, atau berorientasi politik yang dilakukan terhadap orang-orang karena identitas gendernya, orientasi seksual, dan sistem sosial yang hierarki dimana di dominasi laki-laki seperti di dalam hubungan keluarga, militer, organisasi, atau dunia kerja. (O'Toole and Schiffman:1997, dalam tulisan Collins: 2023). KBG mempunyai dampak negatif pada tingkat individu dan masyarakat. Pada tingkat individu, penyintas dapat mengalami hal-hal negatif seperti: konsekuensi kesehatan fisik dan psikologis, hilangnya pekerjaan, kehilangan pendidikan dan stigma buruk dari komunitasnya. Dalam jangka panjang, pengalaman-pengalaman ini menghambat pemberdayaan perempuan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan konflik lebih lanjut dan ketidakstabilan lebih mungkin terjadi (UNDP: 2019). Bagi penyintas KBG yang ada di wilayah pasca konflik, mereka menjadi sasaran berbagai jenis kekerasan yang beragam, dengan berbagai dampak buruk terhadap kesehatan para penyintas bahkan berdampak ke keluarga mereka. Para penyintas KBG sangat memerlukan intervensi yang menysasar berbagai dimensi yakni dukungan psikologis, kesehatan, dan ekonomi untuk merehabilitasi mereka agar dapat menjalani kehidupan yang produktif (reliefweb.int).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Awal Mula Gerakan Perempuan Mosintuwu Terbentuk

Poso adalah sebuah wilayah yang berada di Sulawesi Tengah. Konflik Poso terjadi pada kurun waktu 1998-2005. Konflik Poso sendiri sudah mereda setelah di sepakatinnya Deklarasi Malino. Namun pasca konflik, pembangunan perdamaian masih terus dilakukan dan sangat membutuhkan peranan berbagai elemen masyarakat, sayangnya peran perempuan dalam proses rehabilitasi pasca konflik di Poso kurang dilibatkan. Hal inilah yang melatarbelakangi seorang Lian Gogali mendirikan sebuah gerakan perempuan, yakni Institut Mosintuwu (nasional.kompas.com). Lian Gogali adalah pendiri dan ketua Institut Mosintuwu. Institut Mosintuwu berdiri sekitar tahun 2009 tepatnya di Desa Pamona, adalah organisasi masyarakat akar rumput yang bekerja untuk upaya perdamaian dan keadilan pada saat konflik dan pasca konflik di wilayah Kabupaten Poso dan sekitarnya. Berdiri atas keprihatinan peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan adanya kepentingan ekonomi politik dibalik konflik kekerasan yang berakhir pada pengelolaan sumber daya alam yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan marginal, dan perempuan akar rumput. Saat ini Mosintuwu beranggotakan pihak-pihak dari berbagai latarbelakang suku dan agama yang ada di Kabupaten Poso. Nama Mosintuwu sendiri diambil dari bahasa Pamona (salah satu suku di Poso) yang berarti Bekerja Bersama-sama. Adapun upaya-upaya Mosintuwu dalam membangun perdamaian di Poso dengan berbagai upaya, diantaranya (Babutung: 2018):

1. Sekolah Perempuan Mosintuwu;
2. Perpustakaan Keliling Project Shopia;
3. Perempuan Pembaharu Desa;
4. Lingkar Diskusi dan Aksi;
5. Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA);
6. Radio Komunitas;
7. Koran Perempuan Poso;
8. Dodoha Mosintuwu;
9. Eko Wisata, dan;
10. Usaha Desa.

b. Mengenal Lian Gogali sebagai Agen Perdamaian Poso

Merlian “Lian” Gogali adalah perempuan kelahiran 28 April 1978. Ia adalah lulusan S2 dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ia adalah aktivis perempuan yang memantapkan hatinya untuk mendedikasikan hidupnya membangun harmoni perdamaian di Poso. Keputusan

Tiffany Setyo Pratiwi

Meninjau Peran Gerakan Perempuan Mosintuwu Pasca Konflik Poso dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Melalui Pendekatan *Gender-Responsive Peacebuilding*

ini ia ambil saat ia melakukan penelitian atas tesisnya yang berjudul “Politik Ingatan Perempuan dan Anak dalam Konflik Poso”. Saat itu, seorang ibu yang ia jadikan narasumber dalam penelitiannya berbalik bertanya, “Terus kalau kamu sudah menulis penelitian tentang kami, lalu apa? Apa yang akan berubah dari kehidupan kami?” (greennetwork.id). Pertanyaan inilah yang membuat seorang Lian Gogali tertampar dan memutuskan kembali ke Poso. Sebagai langkah awal, ia membuat sebuah sekolah perdamaian bagi perempuan yang dinamai Sekolah Perempuan Mosintuwu. Melalui sekolah ini, perempuan-perempuan di Poso yang memiliki latar belakang agama berbeda berkumpul menjadi satu, sehingga membuka ruang bagi mereka untuk saling berdiskusi dan berefleksi, menyampaikan permasalahan-permasalahan yang mereka rasakan dan alami, hingga berbagi cerita tentang agama atau tradisi untuk mengurai prasangka-prasangka yang terbangun selama konflik. Proses yang ia tempuh dalam gerakan ini sangat berat, dari larangan para suami yang tidak memperbolehkan istrinya untuk bergabung, ancaman dan teror dari kelompok agama yang menganggap ilmu pengetahuan yang ia ajarkan bukanlah ajaran Tuhan, hingga ketidaksukaan dari oknum pemerintah. Namun berkat perjuangannya dan perempuan-perempuan Poso, saat ini Sekolah Perempuan Mosintuwu telah tersebar di 80 desa di Poso dan memberikan dampak perubahan yang sangat signifikan dalam membantu proses rehabilitasi pasca konflik di Poso (greennetwork.id). Bagaimana perubahan tersebut terjadi, Penulis akan bahas pada sub bab selanjutnya dengan meninjaunya melalui pendekatan *Gender-Responsive Peacebuilding*.

c. Gerakan Perempuan Mosintuwu Ditinjau Melalui Pendekatan *Gender-Responsive Peacebuilding*

Gender-Responsive Peacebuilding atau Pembangunan Perdamaian yang Responsif Gender melibatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian, artinya pendekatan pembangunan perdamaian yang sensitif gender menyoroti perlunya pemberdayaan perempuan untuk mempertahankan perdamaian di tingkat lokal sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun kapasitas politik, kelembagaan, dan lokal yang kuat (Aggestam dan Holmgren: 2022). Gerakan perempuan Mosintuwu di Poso adalah contoh nyata bagaimana perempuan terlibat dalam proses perdamaian khususnya pasca konflik.

Penulis akan menjabarkan pendekatan *Gender-Responsive Peacebuilding* dalam mencegah dan merespon KBG pasca konflik Poso yang diupayakan oleh Gerakan Mosintuwu, sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Perempuan dalam Mencegah KBG dan Promosi HAM

Pasca konflik Poso, KGB sering dialami oleh perempuan-perempuan disana. Kasus kekerasan perempuan pasca konflik Poso adalah benar adanya. Laporan yang disusun oleh Komnas Perempuan yang berjudul “Ringkasan Eksekutif: Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk Poso, 2009” dijelaskan bahwa terdapat 72 kasus yang terdokumentasikan dimana kekerasan seksual mencapai 86.11% (komnasperempuan.go.id). Pendampingan dan perlindungan yang hadir untuk korban salah satunya dari gerakan Mosintuwu. Dalam laman online Tutura.id menceritakan kisah seorang perempuan akar rumput bernama Lina Laando yang menjadi paralegal di Mosintuwu, ia mengemban tugas menjadi Koordinator Perlindungan Perempuan dan Anak yang mendampingi kasus kekerasan berbasis gender hingga ke meja hijau. Paralegal sendiri adalah seseorang yang membantu masyarakat yang bermasalah dengan hukum dan khusus dalam bentuk pelayanan, mediasi, konsultasi yang sifatnya non-litigasi (tutura.id). Aksi nyata ini juga dilakukan oleh anggota penggerak Mosintuwu lainnya.

Gerakan Mosintuwu melalui Sekolah Perempuan Mosintuwu mengadakan Kongres Perempuan Poso. Terlaksananya kongres perempuan pertama dan terbesar pasca konflik tahun 2014 tersebut diinisiasi oleh Gerakan Mosintuwu. Kemudian peran organisasi internasional yakni Search for Common Ground mendukung dan terlibat dalam kongres ini. Kongres yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai 27 Maret 2014 di Dodoa berjalan dengan sukses. Hal ini dikarenakan kongres ini mampu menghadirkan hampir 450 peserta umum dari 70 desa dan 14 kecamatan di Kabupaten Poso, ditambah para pejabat daerah di Poso. Perempuan-perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda bagian dari korban konflik Poso berpartisipasi dalam kongres ini (Purnasanti: 2018). Dari kongres ini melahirkan rekomendasi untuk perlindungan perempuan dan anak di Poso. Rekomendasi tersebut dilayangkan untuk beberapa pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, komnas perempuan, lembaga adat, dan masyarakat. Rekomendasi tersebut bisa diakses melalui <https://www.mosintuwu.com/2014/04/12/rekomendasi-perlindungan-perempuan-dan-anak/>. Salah satu poin penting yang dinyatakan dalam rekomendasi adalah mendorong Pemerintah Daerah melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) bekerjasama dengan organisasi perempuan di tingkat lokal Kabupaten Poso untuk membangun sistem pengaduan dan pelayanan, penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tidak berhenti disitu saja, pendekatan kelembagaan hukum yang dilakukan gerakan Mosintuwu untuk melindungi korban KGB adalah dengan melakukan kerjasama dengan kepolisian Poso pada tahun 2018.

Tiffany Setyo Pratiwi

Meninjau Peran Gerakan Perempuan Mosintuwu Pasca Konflik Poso dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KGB) Melalui Pendekatan *Gender-Responsive Peacebuilding*



Gambar 1. Penandatanganan MoU Penghentian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak antara Gerakan Mosintuwu (Lian Gogali) dan Kepolisian Resort Poso pada tanggal 21 April 2018
(Sumber: VOA Indonesia)

Pendekatan dengan aparat hukum yakni kepolisian menjadi strategi dari Gerakan Mosintuwu dalam mencegah dan merespon KBG di Poso. Tujuannya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap korban dan pelaku bisa terlaksana dengan adil.

2. Peran Kepemimpinan Perempuan dan Penyediaan Fasilitas yang Aman bagi Perempuan

Kepemimpinan perempuan dalam gerakan Mosintuwu dapat dilihat melalui pembentukan Rumah Perlindungan untuk Perempuan dan Anak (RPPA). RPPA ini dibentuk berangkat dari ide Lian Gogali sebagai pimpinan gerakan Mosintuwu. Jalannya kegiatan tim RPPA diketuai oleh seorang koordinator bernama Evi Tampataku. Evi bertugas memantau, mendata, mendampingi, dan membantu korban KBG. Evi mengungkapkan dari data RPPA sejak 2014 terdapat 30 kasus KDRT, 31 kasus kekerasan seksual, dan 2 kasus pemerkosaan (mosintuwu.com). Struktur kepemimpinan perempuan dalam RPPA ini menunjukkan bahwa peranan perempuan adalah kekuatan yang berdampak langsung bagi perlindungan perempuan di Poso. Gerakan kolektif perempuan yang diusung oleh Mosintuwu ini mampu mengajak perempuan-perempuan Poso yang berasal dari berbagai latar belakang untuk ikut aktif berperan. Peran utama Gerakan Mosintuwu dalam mencegah dan merespon KBG ialah memperkuat pengetahuan perempuan-perempuan Poso melalui Sekolah Perempuan dan membangun RPPA.

RPPA memiliki tujuan utama untuk membangun gerakan masyarakat bersama yang berdasarkan kesetaraan dan bebas dari kekerasan. Proses membangun gerakan ini dengan memulai membentuk tim RPPA yang menjadi pejuang anti kekerasan terhadap anak dan perempuan di desa mereka masing-masing. Tim RPPA ini berjumlah 19 anggota tim dari 17 desa di 10 kecamatan. Kemudian tim ini mendapatkan pelatihan dan keterampilan untuk

melakukan pendampingan dan manajemen kasus kekerasan perempuan dan anak. Pelatihan ini dibimbing oleh Sondang Sidabutar seorang psikolog (mosintuwu.com).

Sejak tahun 2010, gerakan Mosintuwu melalui RPPA memantau dan memberikan pendampingan korban KBG di Poso. Adapun kondisi-kondisi umum yang dialami para korban KBG memiliki pola yang sama, diantaranya:

- a. Para korban KBG tidak memiliki pengetahuan cukup harus melapor kemana;
- b. Para korban KBG cenderung tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami karena malu dan dilabeli sebagai aib keluarga;
- c. Para korban KBG menghadapi ketakutan untuk melapor karena mereka takut akan diintimidasi atau ditekan oleh pelaku bahkan keluarga pelaku;
- d. Para korban KBG tidak mendapatkan perlindungan yang aman di lingkungan keluarganya dikarenakan kondisi miris yang terjadi pelaku KBG berasal dari keluarga terdekat.

Dengan kondisi-kondisi tersebut, maka gerakan Mosintuwu membuat Gerakan Pertolongan Pertama Pendampingan dan Perlindungan Korban atau Gerakan P3K.

3. Peran dan Dukungan Melalui Pelatihan, Asosiasi Jurnalis Perempuan, Dan Membuat Video Dokumenter Edukasi KBG

Beberapa pendekatan Gerakan Mosintuwu dalam membangun edukasi dan jalan perubahan menghadapi isu-isu KBG, diantaranya:

- a. Kampanye *One Billion Rising*, kampanye ini dilakukan pada hari Valentine tahun 2017. Dimana gerakan massal perempuan-perempuan Poso turun ke jalan utama Poso dan melakukan kampanye dengan menyerukan menghentikan segala bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap anak dan perempuan di Poso.
- b. Koran Mosintuwu yang dirilis menjadi alat edukasi yang memuat informasi-informasi penting tentang perempuan di Poso.



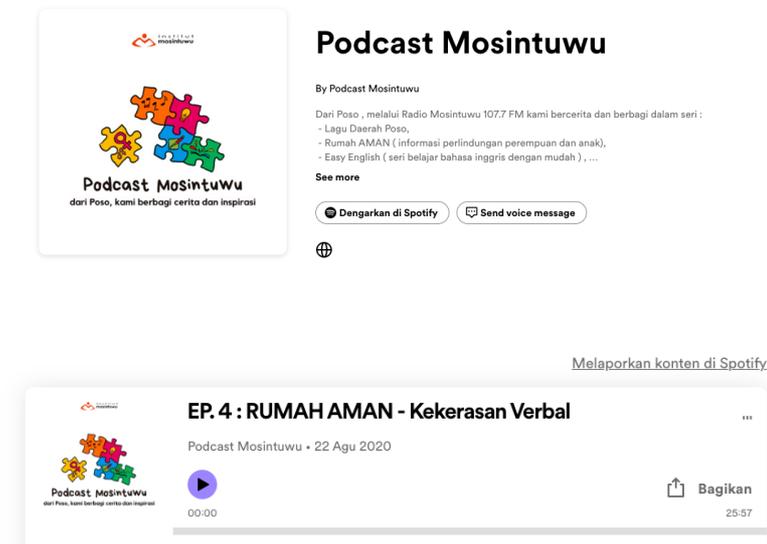
Tiffany Setyo Pratiwi

Meninjau Peran Gerakan Perempuan Mosintuwu Pasca Konflik Poso dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Melalui Pendekatan *Gender-Responsive Peacebuilding*

Gambar 2. Koran Mosintuwu Menjadi Sarana Aspirasi Suara Perempuan Poso

Sumber: www.mosintuwu.com

- c. Melalui Podcast Mosintuwu di link spotify, salah satu pendekatan yang dimanfaatkan dengan media informasi kekinian yakni membuat sebuah podcast.



Gambar 3. Dukungan Edukasi oleh melalui Podcast Mosintuwu tentang Kekerasan

Sumber: podcasters.spotify.com

- d. Radio Komunitas Mosintuwu, tahun 2015 Radio Mosintuwu pertama kali mengudara di gelombang 107.7 FM. Radio ini membahas berbagai isu dan menjadi penangkal hoaks. Menjadi wadah untuk menyuarakan pandangan serta pendapat, perkembangan dinamika sosial, ekonomi, dan terkait kekerasan berbasis gender di Poso.

4. Akses Penyembuhan Trauma

Mosintuwu membentuk Gerakan Pertolongan Pertama Pendampingan dan Perlindungan Korban atau Gerakan P3K pada tahun 2014. Salah satu implementasi gerakan P3K ini melakukan pendampingan kepada korban KBG yang dilakukan oleh Lina Laando



sebagai paralegal pendamping korban kekerasan seksual. Salah satu kasus yang Lina dampingi adalah korban pemerkosaan bergilir yang dialami oleh remaja berusia 15 tahun.

Gambar 4. Lina Laando, Pendamping Korban Kekerasan Seksual
(Sumber: *Tutura.id*)

Beberapa agenda-agenda yang dilakukan oleh gerakan P3K Mosintuwu, diantaranya:

1. Disepakati setiap bulannya, tim mencatat kasus-kasus kekerasan yang terjadi di desa;
2. Tim akan menganalisis metode dan mekanisme pendekatan terhadap korban dan pelaku;
3. Tim akan memberikan pendampingan kepada korban dan membantu korban untuk bisa sembuh dari traumanya;
4. Tim mengupayakan jalur hukum untuk membawa kasus kekerasan yang dialami korban.

KESIMPULAN

Konflik Poso telah berakhir namun proses pembangunan perdamaian berkelanjutan masih terus dirawat dan melibatkan berbagai pihak hingga saat ini. Tidak terkecuali dari sisi kelompok masyarakat, khususnya kehadiran gerakan perempuan yakni Mosintuwu. Gerakan Mosintuwu lahir pasca konflik Poso. Dari pembahasan dan analisis mengenai peran gerakan Mosintuwu melalui pendekatan *gender-responsive peacebuilding* dalam mencegah dan merespon KBG pasca konflik Poso diperoleh beberapa poin penting, yakni:

1. Gerakan Mosintuwu berperan aktif dalam membangun perdamaian pasca konflik di Poso dari usaha yang dimulai dari bawah yang menemui banyak hambatan namun tetap eksis hingga sekarang;
2. Pendekatan-pendekatan yang diambil oleh gerakan Mosintuwu sangat responsif gender dibuktikan dengan pembentukan Rumah Perlindungan untuk Perempuan dan Anak (RPPA);
3. Sekolah Perempuan Mosintuwu merupakan sebuah cara yang memupuk nilai toleransi, nilai kesetaraan gender, dan membantu memperkuat pengetahuan perempuan di Poso;
4. Gerakan Mosintuwu menyediakan akses penyembuhan trauma bagi korban KBG dengan membentuk Gerakan Pertolongan Pertama Pendampingan dan Perlindungan Korban (P3K) yang memberdayakan perempuan sebagai paralegal mendampingi korban KBG.

Tiffany Setyo Pratiwi

Meninjau Peran Gerakan Perempuan Mosintuwu Pasca Konflik Poso dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG) Melalui Pendekatan *Gender-Responsive Peacebuilding*

5. Pemanfaatan berbagai media untuk memperluas, mengedukasi, menyadarkan masyarakat tentang isu-isu kekerasan berbasis gender sangat inovatif, dimulai dari media radio dan koran, kampanye langsung di jalanan, hingga media podcast di spotify.

DAFTAR PUSTAKA

- African Union. (2024). *A Reflection Contribution by African Women to Peace and Security Agenda on The Continent*. Diakses melalui <https://au.int/en/articles/reflection-contributions-african-women-peace-and-security-agenda-continent>
- Aggestam, Karim. Holmgren, Linda Eitrem. (2022). *The Gender Resilience Nexus in Peacebuilding The Quest for Sustainable Peace*. Journal of International Relations and Development. Diakses melalui <https://link.springer.com/article/10.1057/s41268-022-00269-9>
- Collins, Anthony. (2013). *Gender-Based Violence*. Publisher: Springer Reference. https://www.researchgate.net/publication/280978228_Gender-Based_Violence
- General Assembly Security Council. (2010). *Women's Participation in Peacebuilding*. Diakses melalui <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20S%202010%20466.pdf>
- Indonesia Baik Id. 2020. Diakses melalui <https://indonesiabaik.id/infografis/keistimewaan-perempuan-dalam-pasukan-penjaga-perdamaian>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. "Apa itu Kekerasan Seksual". Diakses melalui <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>
- KEMEN PPPA. *Perempuan Sebagai Agen Perdamaian Mampu Terlibat dalam Penyelesaian Konflik*. Diakses Melalui <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2930/perempuan-sebagai-agen-perdamaian-mampu-terlibat-dalam-penyelesaian-konflik>
- Kendall Oswald. 2023. *GENDER DISCRIMINATION: AN OVERVIEW OF HISTORICAL AND CONTEMPORARY ISSUES*. Journal Of The International Academy For Case Studies, 29 (1), Pp.1-2. Ffhal-04109042f
- Koran Mosintuwu Edisi 1. Diakses Melalui <https://www.mosintuwu.com/wpcontent/uploads/2015/01/4.pdf>
- Kompas.com. (2016). *Merehabilitasi Perempuan Korban Konflik Poso Lewat Sekolah Toleransi*. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2016/06/13/09251971/NaN>
- Komnas Perempuan. Pelapor Khusus Komnas Perempuan Untuk Poso. Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran & Penanganan. Dokumentasi Pelanggaran HAM Terhadap Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005. Diakses Melalui <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/pelapor-khusus-komnas-perempuan-untuk-poso-perempuan-dalam-jeratan-impunitas-pelanggaran-and-penanganan-dokumentasi-pelanggaran-ham-terhadap-perempuan-selama-konflik-bersenjata-di-poso-1998-2005>
- Maryanti Babutung. (2020). *Peran Institut Mosintuwu dalam Membangun Budaya Perdamaian melalui Kaum Perempuan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah*. JILS (Journal of International and Local Studies), 2(1), 74–87. <https://doi.org/10.56326/jils.v2i1.703>

- Munawwarah, Fathia. (2023). *Perempuan Akar Rumput Turun Tangan Usut Kekerasan di Poso*. Tutura Id. Diakses Melalui <https://tutura.id/homepage/readmore/perempuan-akar-rumput-turun-tangan-usut-kekerasan-di-poso-1672995305>
- Muamar, Abul. (2023). *Lian Gogal, Menghidupkan Kembali Harmoni di Poso Lewat Sekolah Perdamaian*. *Green Network Asia, Indonesia*. Diakses melalui <https://greennetwork.id/figur/lian-gogali-menghidupkan-kembali-harmoni-di-poso-lewat-sekolah-perdamaian/>
- Purnasanti, Linda Uji. 2018. *Efektifitas Peran Search for Common Ground dalam Menangani Kejahatan Kemanusiaan terhadap Perempuan dan Anak-anak Korban Konflik Poso 2009-2016*. Volume 4 Nomor 1 Hal 9-21. *Journal of International Relations*.
- Podcast Mosintuwu. (2020). Diakses melalui <https://podcasters.spotify.com/pod/show/radio-mosintuwu/episodes/EP--4--RUMAH-AMAN---Kekerasan-Verbal-eigc4q>
- Relief Web. (2024). “*Gender Based Violence in The Context of Armed Conflict in Northern Ethiopia*”. Diakses Melalui <https://reliefweb.int/report/ethiopia/gender-based-violence-context-armed-conflict-northern-ethiopia>
- Red Line Indonesia. (2021). *Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender*. Diakses melalui <https://redlineindonesia.org/bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender/>
- UNDP Gender and Recovery Toolkit. (2020). Diakses melalui <https://www.undp.org/publications/undp-gender-and-recovery-toolkit>
- UN News. (2023). *Explainer: Why Women’s Role in Sustaining Peace is More Critical Than Ever*. Diakses Melalui <https://news.un.org/en/story/2023/10/1142762>
- UNDP. *Concept Note: Gender Responsive Peace Building*. Diakses melalui https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/oslo_governance_centre/af3d9f570ceba2cbf309be1da98f946dcd03f0944dc7b2b5d6df12fd2a69c67.pdf
- VOA Indonesia. (2018). *Institut, Polres Poso Sepakati Penghentian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Di Akses Melalui <https://www.voaindonesia.com/a/institut-mosintuwu-polres-poso-sepakati-penghentian-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/4359976.html>
- Website Resmi Mosintuwu. (2016). “*Membangun Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak*”. Diakses melalui <https://www.mosintuwu.com/2016/04/09/training-membangun-rumah-perlindungan-perempuan-dan-anak/>
- Website Resmi Mosintuwu. (2018). *Rayakan Hari Kartini, Pastikan Perlindungan Anak dengan Nota Kesepahaman*. Diakses Melalui <https://www.mosintuwu.com/2018/04/22/rayakan-hari-kartini-institut-mosintuwu-dan-polres-tandatangani-nota-kesepahaman-hentikan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/>
- Website Resmi Mosintuwu. Diakses melalui <https://www.mosintuwu.com/tentang-kami/>